

**MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)  
(Studi Multi Situs Di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro)**

Oleh

**Hernani, Sowiyah, Sumadi**

FKIP Unila: Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng

E-Mail: hernani.mp3@gmail.com

HP.:-

**Abstract: Education Management Children with Special Needs.**

The purpose of this study was to analyze the implementation of Education Management Children with Special Needs in SMPN 9 and SMPN 10 Metro City, included: 1) Planning of education, 2) Implementation of education, 3) Evaluation of education, 4) factors supporting and education management. This study used a qualitative approach with a multi-site study design. Data was collected by interview, observation, and documentation. The Research Result of education management children with special needs education management have been run in accordance with the applicable regulations is the curriculum that is used together with other regular school. Teachers who teach in the classroom inclusion makes learning program design according to the characteristics and needs of each learner. Factors supporting the implementation of education children with special needs received financial assistance from the central government, teachers consistently carried out its duties and functions, there is also adequate learning media, communicated with parents is good enough. Inhibiting factor is the lack of specific guidance counselor, teachers have not been trained, there are still parents are less concerned with the inclusive education program, and the learning media is still lacking.

**Keywords:** education management, children with special needs, junior high school

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Manajemen Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, meliputi: 1) Perencanaan pendidikan, 2) Pelaksanaan pendidikan, 3) Evaluasi pendidikan, 4) Faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen pendidikan ABK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi situs. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian manajemen pendidikan ABK ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu kurikulum yang digunakan sama dengan sekolah reguler lainnya. Guru yang mengajar di kelas inklusi membuat rancangan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan ABK mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat, guru-guru konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya, tersedia juga media belajar yang memadai, komunikasi dengan orang tua cukup baik. Faktor penghambatnya adalah kurangnya guru pembimbing khusus, guru belum pernah

mengikuti pelatihan, masih ada orang tua kurang peduli terhadap program pendidikan inklusi, dan media belajar yang masih kurang.

**Kata kunci:** anak berkebutuhan khusus, manajemen pendidikan, sekolah menengah pertama

Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) membutuhkan fasilitas tumbuh kembang khusus agar memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan inklusif saat ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah atau dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan dalam waktu yang bersamaan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan inklusif juga diharapkan dapat menjawab kesenjangan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak semua warga negara dalam bidang pendidikan. Dengan diselenggarakannya pendidikan khusus secara inklusif di sekolah umum dan sekolah kejuruan, hal ini akan berpengaruh pada manajemen sekolah sehingga di sekolah perlu adanya kesamaan konsep dan cara pandang serta penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Para pendidik dan tenaga kependidikan serta *stakeholder* lainnya harus memiliki kesadaran bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah “visi” bukan sebuah “ilusi”.

Implementasi berbagai kebijakan terkait hak anak berkebutuhan khusus yang telah dirumuskan hendaknya ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah, agar anak-anak Indonesia yang berkebutuhan khusus memperoleh hak-hak mereka. Berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor 213/KPTS/D.3/2011 ditetapkan bahwa menetapkan SD, SMP, SMA Negeri Kota Metro yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pelaksana Sekolah Inklusi.

Pada observasi awal yang dilakukan di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, semakin jelas meskipun anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah dan menerima pendidikan formal, terlihat masih banyak aspek yang harus dibenahi. Anak berkebutuhan khusus (ABK) di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro tergolong anak yang lamban belajar dan selalu tertinggal dari teman-teman lainnya dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Saat ini peserta didik/ABK tersebut diberi pembelajaran tambahan agar dapat memahami materi yang diajarkan. Pembelajaran tambahan juga diberikan agar peserta didik/ABK lamban belajar dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Peserta didik/ABK yang lamban belajarnya merupakan salah satu kondisi siswa yang berkebutuhan khusus dalam hal tertentu berbeda dengan anak lain pada umumnya. Salah satu upaya membantu mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan pendidikan inklusi berorientasi pada masalah kesulitan belajar siswa diklasifikasi menurut tingkat kesulitannya.

Pendidikan inklusi di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari di kelas reguler. Penyelenggaraan pendidikan kelas inklusi boleh jadi merupakan terobosan baru untuk

mengatasi masalah pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa tanpa harus ada pemisahan dengan anak normal lainnya. Pentingnya untuk diketahui bahwa keberadaan kelas inklusi dapat menciptakan suatu sistem pendidikan moral bagi siswa, agar mampu mengkondisikan diri terhadap lingkungan yang kompleks, dimana keberagaman karakteristik siswa bisa membawa ke arah pendidikan budaya baru yang lebih modern.

Pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro dimana anak-anak berkebutuhan khusus bergabung dengan anak-anak pada umumnya yang sebaya, perlu dikembangkan manajemen pendidikan inklusi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus. Selama ini pendidikan inklusi baru diselenggarakan untuk anak berkebutuhan pendidikan khusus namun belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Agar pengembangan pendidikan inklusi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu manajemen pendidikan inklusi yang baik.

Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kemudian pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan khusus yang intinya bahwa pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah upaya nyata dari Pemerintah dalam bentuk regulasi untuk menjadi acuan semua pihak yang terkait dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mekanisme dan tugas-tugas pemerintah kabupaten/kota dan sekolah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kemudian dijelaskan pula tugas fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi, pengelolaan dan teknis penyelenggaraan serta sistem dukungan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik.
2. Menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

3. Menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
4. Wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
5. Wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
6. Memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.

Berbagai pertimbangan juga, yang menentukan jumlah maksimal di bawah standar maksimal pada rombongan belajar satuan pendidikan khusus, yaitu untuk SD/MI di bawah 5 peserta didik yang memiliki kelainan dan untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK di bawah 8 peserta didik yang memiliki kelainan. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan untuk Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras). Atau ada juga yang menetapkan maksimal 10% dari setiap rombongan belajar, sehingga jumlah maksimal di SD/MI ada yang menetapkan 3 peserta didik berkebutuhan khusus dan di SMA/SMK/MA/MAK ada yang menetapkan 5 peserta didik berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus menurut Heward (1989:210) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Melaksanakan pendidikan inklusi di setiap Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kota Metro menunjuk SMPN 9 dan SMPN 10 Metro sebagai penyelenggaraan pendidikan

inklusi untuk menerima anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama anak-anak normal lainnya.

Anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bidang pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan;

pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang diselenggarakan secara inklusi.

Menurut Joyce dan Weil (2000:13) mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran. Selanjutnya, Joyce menyatakan bahwa model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam perancangan pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di sekolah tersebut, pendidikan inklusi belum berjalan secara optimal, masalah yang dihadapi baik dari internal sekolah, orang tua, siswa maupun masyarakat. Pendidikan inklusi antara lain belum dilakukan identifikasi dan asesmen terhadap siswa baru berkebutuhan khusus, hal ini sangat penting untuk merancang program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Para guru di SMPN 9 dan SMPN

10 Metro belum menguasai bagaimana merancang program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, dari perancangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian dalam *setting* pendidikan inklusi. Kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), guru reguler yang ada belum pernah mendapat pelatihan menangani siswa berkebutuhan khusus, dan pemahaman pihak sekolah pada tingkat penyelenggaraan pendidikan inklusi belum sepenuhnya diketahui. Sedangkan peran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga masih sebatas perantara antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan satuan pendidikan dalam hal pendanaan atau program, belum ada upaya untuk mengembangkan sendiri implementasi pendidikan inklusi di tingkat kota.

Semua unsur-unsur untuk mendukung terlaksananya pendidikan inklusi sangat diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur penunjang pendidikan inklusi antara lain adalah pendanaan yang memadai untuk mendukung proses pendidikan inklusi, sarana dan prasarana seperti aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dan media pembelajaran yang tepat, serta dukungan orangtua siswa baik orang anak normal maupun orangtua anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi guru maupun kepala sekolah menyadari masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki pelaksanaan program pendidikan inklusi dapat berjalan dengan efektif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif fenomenologis. Fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan

fenomena-fenomena yang muncul dari manajemen pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro.

Kehadiran peneliti menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpul data. Hal ini juga dikemukakan oleh Sugiyono (2006: 305) bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, akan tetapi ketika fokus penelitian menjadi lebih jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

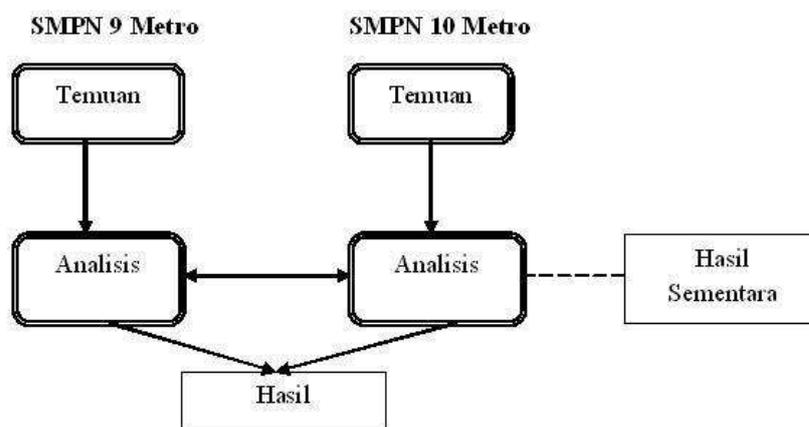
Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, agar data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi serta didasarkan pada tema yang muncul di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu: wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi. Hasil wawancara dari informan akan penulis lakukan analisis data secara kualitatif, guna mengungkapkan analisis hasil pembelajaran di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro. Analisis data kualitatif adalah melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis data dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena serta hubungan keterkaitannya.

Pada penelitian kualitatif analisis data dapat dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Analisis data ganda tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian yang menyatakan dengan teknik pengumpulan data. Adapun keseluruhan proses penelitian terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen dan diakhiri dengan analisis tema. Hal itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan penelitian dilakukan secara silih berganti antara pengumpulan data dengan analisis data sampai pada akhirnya keseluruhan masalah penelitian itu terjawab. Hal ini tergambar dalam Gambar 1, mengenai dua data tunggal.



Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil penelitian dapat digunakan beberapa cara yaitu dengan Kredibilitas, Transferabilitas dan Konfirmabilitas. Kredibilitas adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep Informan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti melakukan teknik triangulasi, berarti peneliti sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

SMPN 9 Metro sebagai penyelenggara pendidikan inklusi tentu memiliki peserta didik heterogen, selain peserta didik reguler juga terdapat peserta didik berkebutuhan khusus, karena setiap peserta didik mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya dalam kelas yang sama. Semua peserta didik berkebutuhan yang saat ini terdapat di SMPN 9 Metro adalah peserta didik lamban belajar.

Kurikulum yang digunakan di SMPN 9 Metro adalah kurikulum sekolah reguler, jadi kurikulum yang dirancang oleh guru berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) untuk sekolah reguler kemudian disusun menjadi program tahunan, program semester, silabus dan RPP. Program yang dirancang oleh guru untuk diterapkan di kelas dan berlaku sama untuk semua peserta didik.

Pelaksanaan pembelajaran di SMPN 9 Metro belum menunjukkan proses pembelajaran yang menghargai perbedaan setiap individu, metode yang digunakan oleh guru pada saat mengajar di kelas masih memperlihatkan bahwa

semua peserta memiliki kemampuan yang sama. Begitupun dengan materi yang diberikan, belum terlihat perbedaan kedalaman materi yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Pengawas pembina SMPN 9 Metro menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara proses pembelajaran di kelas reguler dan kelas inklusi. Guru kelas sesekali hanya melakukan pendekatan untuk membimbing dan mendampingi siswa.

Orang tua siswa menyatakan harapannya agar proses pembelajaran bagi siswa-siswi dapat lebih ditingkatkan lagi seperti pemberian Pekerjaan Rumah (PR) yang lebih banyak agar siswa-siswa tidak banyak bermain di rumah dan siswa-siswi lebih berprestasi.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada proses pembelajaran di kelas inklusi menunjukkan bahwa guru telah melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran, akan tetapi perencanaan yang dilakukan oleh guru seperti pengelolaan kelas dengan menempatkan siswa duduk paling depan agar guru lebih mudah membimbingnya belum dilakukan, dan bahan ajar yang digunakan berlaku untuk semua siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran guru telah melakukan penguatan terhadap siswa dengan memberikan bimbingan dan melibatkan siswa agar lebih aktif, dan guru telah menggunakan media belajar untuk menyampaikan materi. Dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi proses pembelajaran adalah silabus dan RPP.

Proses evaluasi dan penilaian di SMPN 9 Metro sama dengan SMP reguler pada umumnya seperti ulangan harian, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Peserta didik berkebutuhan khusus melaksanakan evaluasi tersebut bersama-sama dengan peserta didik reguler, tidak dilakukan modifikasi soal seperti tingkat kesulitan dan jumlah soal yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena

siswa berkebutuhan khusus masih bisa mengikuti proses penilaian bersama siswa lainnya. Modifikasi alokasi waktu juga tidak dilakukan seperti menambah alokasi waktu untuk peserta didik lamban belajar.

Observasi terhadap proses pengawasan dan penilaian dilakukan oleh peneliti pada saat siswa melakukan ulangan harian, siswa berkebutuhan khusus melaksanakan ulangan harian bersama-sama dengan siswa reguler lainnya. Siswa yang mendapat nilai di bawah KKM nilainya dipadukan dengan hasil penilaian pada pelaksanaan program inklusi pada siang hari.

Faktor pendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 Metro antara lain sekolah masih berkomitmen untuk melaksanakan program inklusi, masih ada siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum, pemerintah masih mendukung terlaksananya program dengan memberikan dana operasional, guru-guru masih konsisten melaksanakan program inklusi ini, ada media pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses KBM, adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua.

Faktor yang masih menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 Metro adalah masih ada sebagian orang tua yang kurang peduli terhadap program inklusi, media pembelajaran yang masih kurang, tidak ada Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah ini, pengetahuan guru tentang cara mendidik anak berkebutuhan khusus masih kurang, sebagian orang tua belum konsisten dalam mendukung program inklusi ini.

Sedangkan harapan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 Metro adalah adanya pelatihan untuk guru mengenai cara menangani siswa inklusi, ada Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi, orang tua lebih aktif dalam mendukung anaknya agar program ini lebih efektif.

SMPN 10 Metro sebagai penyelenggara pendidikan inklusi tentu memiliki peserta didik heterogen, selain peserta didik reguler juga terdapat peserta didik berkebutuhan khusus, karena setiap peserta didik mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya dalam kelas yang sama. Semua peserta didik berkebutuhan yang saat ini terdapat di SMPN 10 Metro adalah peserta didik lamban belajar.

Kurikulum yang digunakan di SMPN 10 Metro adalah kurikulum sekolah reguler, jadi kurikulum yang dirancang oleh guru berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) untuk sekolah reguler kemudian disusun menjadi program tahunan, program semester, silabus dan RPP. Program yang dirancang oleh guru untuk diterapkan di kelas dan berlaku sama untuk semua peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus masih menggunakan program pembelajaran yang sama dengan peserta didik reguler.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa guru menggunakan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk sekolah reguler, dan RPP yang digunakan berlaku untuk semua peserta didik di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler dan belum dilakukan modifikasi perencanaan pembelajaran terutama untuk peserta didik lamban belajar. Dokumen yang didapat oleh peneliti dalam manajemen kurikulum adalah kalender akademik, silabus, dan RPP.

Pelaksanaan pembelajaran di SMPN 10 Metro belum menunjukkan proses pembelajaran yang menghargai perbedaan setiap individu, metode yang digunakan oleh guru pada saat mengajar di kelas masih memperlihatkan bahwa semua peserta memiliki kemampuan yang sama. Begitupun dengan materi yang diberikan, belum terlihat perbedaan

kedalaman materi yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus.

Pengawas pembina SMPN 10 Metro menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara proses pembelajaran di kelas reguler dan kelas inklusi. Guru kelas sesekali hanya melakukan pendekatan untuk membimbing dan mendampingi siswa.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada proses pembelajaran di kelas inklusi menunjukkan bahwa guru telah melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran, akan tetapi perencanaan yang dilakukan oleh guru seperti pengelolaan kelas dengan menempatkan siswa duduk paling depan agar guru lebih mudah membimbingnya belum dilakukan, dan bahan ajar yang digunakan berlaku untuk semua siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran guru telah melakukan penguatan terhadap siswa dengan memberikan bimbingan dan melibatkan siswa agar lebih aktif, dan guru telah menggunakan media belajar untuk menyampaikan materi. Dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi proses pembelajaran adalah silabus dan RPP.

Proses evaluasi dan penilaian di SMPN 10 Metro sama dengan SMP reguler pada umumnya seperti ulangan harian, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Peserta didik berkebutuhan khusus melaksanakan evaluasi tersebut bersama-sama dengan peserta didik reguler, tidak dilakukan modifikasi soal seperti tingkat kesulitan dan jumlah soal yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena siswa berkebutuhan khusus masih bisa mengikuti proses penilaian bersama siswa lainnya. Modifikasi alokasi waktu juga tidak dilakukan seperti menambah alokasi waktu untuk peserta didik lamban belajar.

Faktor pendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 10 Metro antara lain sekolah masih berkomitmen untuk melaksanakan program inklusi, masih ada siswa

berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum, pemerintah masih mendukung terlaksananya program dengan memberikan dana operasional, guru-guru masih konsisten melaksanakan program inklusi ini, ada media pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses KBM, adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua.

Faktor yang masih menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 10 Metro adalah masih ada sebagian orang tua yang kurang peduli terhadap program inklusi, media pembelajaran yang masih kurang, tidak ada Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah ini, pengetahuan guru tentang cara mendidik anak berkebutuhan khusus masih kurang, sebagian orang tua belum konsisten dalam mendukung program inklusi ini.

Sedangkan harapan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 10 Metro adalah adanya pelatihan untuk guru mengenai cara menangani siswa inklusi, ada Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi, orang tua lebih aktif dalam mendukung anaknya agar program ini lebih efektif.

## **Pembahasan**

Peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian Manajemen Pendidikan pada Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro. Adapun cakupan bahasan yang akan dideskripsikan adalah: (1) Manajemen perencanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, (2) Manajemen pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, (3) Manajemen evaluasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, (5) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari manajemen pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro.

## **Manajemen Perencanaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro**

Kurikulum yang digunakan oleh SMPN 9 dan SMPN 10 Metro sama dengan sekolah reguler lainnya. Kurikulum dirancang dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dari KI-KD tersebut kemudian disusun oleh masing-masing guru kelas dan guru mata pelajaran menjadi program pembelajaran berupa program tahunan, program semester, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 1 Tahun 2008 bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang memuat identitas mata pelajaran, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar.

Program pembelajaran yang disusun oleh guru untuk kelas inklusi juga menggunakan program pembelajaran yang sama dengan kelas reguler lainnya. Hal ini karena peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro adalah peserta didik lambat belajar yang masih bisa mengikuti kurikulum nasional. Hanya saja peserta didik itu membutuhkan pembelajaran remedial agar dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan

kebutuhan peserta didik. Modifikasi kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Apabila sekolah tersebut memiliki konselor, psikolog dan ahli lain yang terkait maka ikut dilibatkan.

Kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa juga terlihat dari hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menetapkan isi kurikulum, menurut Rusman (2009: 29-30) adalah: 1) tingkat kematangan siswa (sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan kematangan siswa), 2) tingkat pengalaman anak, dan 3) taraf kesulitan materi, yaitu disusun dari yang konkret menuju yang abstrak, dari yang mudah menuju ke yang susah, dari sederhana menuju ke yang kompleks. Tingkat kematangan anak berkebutuhan khusus yang tidak sama dengan anak-anak lainnya tentu mengharuskan guru menyesuaikan dengan kemampuan siswa.

Model pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusi Direktorat PSLB:

### **a. Model Kurikulum Reguler**

Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya.

### **b. Model Kurikulum Reguler Dengan Modifikasi**

Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik lainnya. Di dalam model ini bisa terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran berdasarkan kurikulum

reguler dan program pembelajaran individual (PPI). Misal seorang peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti 3 mata pelajaran berdasarkan kurikulum reguler sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI.

c. Model Kurikulum PPI

Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.

Model ini diperuntukkan pada siswa yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar berdasarkan kurikulum reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhannya.

Berdasarkan model pengembangan kurikulum di atas terlihat bahwa SMPN 9 dan SMPN 10 Metro menggunakan model pengembangan kurikulum yang pertama, karena peserta didik lamban belajar yang ada di kelas inklusi masih bisa mengikuti kurikulum reguler. Untuk mencapai kompetensi inti yang ditetapkan peserta didik tersebut mendapatkan jam belajar tambahan dan pemberian motivasi. Kurikulum reguler dapat juga dapat digunakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus lainnya seperti peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa atau autisme yang tidak mengalami gangguan intelektual.

Tujuan pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusi Direktorat PSLB:

a. Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami peserta didik semaksimal

mungkin dalam setting pendidikan inklusi.

b. Membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah.

c. Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusi.

### **Manajemen Pelaksanaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro**

Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh guru SMPN 9 dan SMPN 10 Metro mulai dari perencanaan kegiatan belajar mengajar. Perencanaan yang dilakukan oleh guru meliputi: pertama, merencanakan pengelolaan kelas dengan menempatkan peserta didik lamban belajar pada barisan paling depan untuk memudahkan guru dalam memantau belajar anak ketika guru sedang menyampaikan materi atau melaksanakan evaluasi. Kedua, guru merencanakan metode yang akan digunakan pada saat mengajar di kelas, menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyiapkan media belajar yang akan digunakan dalam menyampaikan materi, dan menyiapkan bentuk tes dan soal yang akan setelah materi selesai untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi.

Selanjutnya guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas inklusi, guru menyajikan materi kepada peserta didik dengan metode, bahan ajar, media ajar, dan latihan soal yang telah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi metode yang digunakan oleh guru belum bervariasi, guru masih lebih banyak menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan isi materi, sedangkan metode lain seperti diskusi, demonstrasi,

dan lain-lain masih jarang dilakukan. Walaupun menggunakan kurikulum sekolah reguler, guru yang mengajar di kelas inklusi hendaknya membuat rancangan program pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Setiap akhir pertemuan atau setelah selesai satu pokok bahasan, guru memberikan latihan soal kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan.

Rancangan pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelas inklusi menurut buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusi Direktorat PSLB (2004:hal.5-6):

1. Merencanakan Kegiatan Belajar Mengajar
  - a. Merencanakan pengelolaan kelas
  - b. Merencanakan pengorganisasian bahan
  - c. Merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar
  - d. Merencanakan penggunaan sumber belajar
  - e. Merencanakan penilaian
2. Melaksanakan Kegiatan belajar Mengajar
  - a. Menyajikan materi/bahan pelajaran
  - b. Mengimplementasikan metode, sumber belajar dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran
  - c. Mendorong siswa untuk terlihat secara aktif
  - d. Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan
  - e. Mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran.
3. Membina Hubungan Antarpribadi
  - a. Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa

- b. Menampilkan kegairahan dan kesungguhan
    - c. Mengelola interaksi antarpribadi
4. Melaksanakan Evaluasi
  - a. Melakukan penilaian selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung, baik secara lisan tertulis, maupun melalui pengamatan
  - b. Mengadakan tindak lanjut.

Rancangan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu didesain berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Oleh karena itu sebelum menyusun program pembelajaran diperlukan identifikasi kebutuhan belajar bagi setiap peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Hasil identifikasi kebutuhan belajar dan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan khusus hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Program pembelajaran individual jangan hanya jadi wacana, tapi harus benar-benar disusun dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus. Penyusunan dan pengembangan program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti guru kelas, GPK, orang tua, dan kepala sekolah agar kebutuhan belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang bersangkutan.

Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif sama dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas reguler. Namun jika diperlukan, anak berkebutuhan khusus membutuhkan perlakuan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses *screening* atau

*assesment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. *Assesment* yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif.

Seorang pendidik hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus biasa disebut dengan *Individualized Education Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI). Perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidikan harus memiliki kemampuan khusus.

Sebelum Program Pembelajaran Individual dijalankan oleh pendidik, terlebih dahulu pendidik harus melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar diperoleh informasi yang akurat mengenai kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Setelah proses *screening* atau *assesment* dilakukan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus teridentifikasi, maka Program Pembelajaran Individual (IEP) dapat dijalankan di kelas-kelas reguler. Program Pembelajaran Individual tersebut sebenarnya tidak mutlak diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran model inklusif di kelas reguler. Pada praktiknya ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang tidak memerlukan Program Pembelajaran Individual. Mereka dapat belajar bersama dengan anak reguler dengan program yang sama tanpa perlu dibedakan.

Program Pembelajaran Individual meliputi enam komponen, yaitu *elicitors*, *behaviors*, *reinforcers*, *entering behavior*,

*terminal objective*, dan *enroute*. Secara terperinci, keenam komponen tersebut yaitu:

1. *Elicitors*, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan atau menyebabkan perilaku
2. *Behaviors*, merupakan kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang dapat ia lakukan
3. *Reinforcers*, suatu kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai akibat dari perilaku dan dapat menguatkan perilaku tertentu yang dianggap baik
4. *Entering behavior*, kesiapan menerima pelajaran
5. *Terminal objective*, sasaran antara dari pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang bersifat tahunan
6. *Enroute*, langkah dari *entering behavior* menuju ke *terminal objective*.

Model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus memperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pembelajaran meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, dan prinsip memecahkan masalah. Prinsip umum ini dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak reguler dalam satu kelas. Baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pembelajaran yang sama. Prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Prinsip khusus ini dijalankan ketika peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan pembelajaran individual melalui Program Pembelajaran Individual (IEP).

### **Manajemen Evaluasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro**

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembelajaran pendidikan, guru harus mengadakan evaluasi terhadap

proses pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro ini sesuai dengan penjelasan Mulyasa (2011: 61) bahwa tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik.

Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusi membuka peluang digunakannya sistem penentuan kenaikan kelas yang beragam. Sistem penilaian bagi anak berkebutuhan khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro menggunakan sistem penilaian yang sama dengan yang diberikan kepada peserta didik lainnya. Perbedaannya peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti penilaian pada ulangan harian pada jam belajar tambahan pada siang hari untuk program inklusi yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Penilaian ini kemudian digabungkan dengan sistem penilaian pada saat peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa lainnya dikelas reguler. Ketidapahaman guru terhadap sistem penilaian dan sistem kenaikan kelas bagi anak berkebutuhan khusus menyebabkan guru memperlakukan anak berkebutuhan khusus sama seperti peserta didik lainnya. Apabila hal ini dilakukan maka sebagian besar anak berkebutuhan khusus tidak naik kelas karena tidak memenuhi standar dari sistem evaluasi dan kenaikan kelas yang digunakan.

Penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan yaitu:

- a. Apabila menggunakan model kurikulum sekolah reguler penuh, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku pada sekolah reguler.
- b. Jika menggunakan model kurikulum reguler dengan modifikasi, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian reguler yang telah

dimodifikasi sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.

- c. Apabila menggunakan kurikulum PPI, maka penilaiannya bersifat individu dan didasarkan pada kemampuan dasar (*base line*).

Sedangkan untuk sistem kenaikan kelas adalah:

- a. Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler penuh, sistem kenaikan kelasnya menggunakan acuan yang berlaku pada sekolah reguler penuh yang sedang berlaku.
- b. Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler yang dimodifikasi, maka sistem kenaikan kelasnya dapat menggunakan alternatif berikut:
  1. Menggunakan model kenaikan kelas yang didasarkan pada usia kronologis
  2. Menggunakan sistem kenaikan kelas reguler
- c. Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum PPI, sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada usia kronologis.

Sistem laporan hasil belajar pada pendidikan inklusi:

- a. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler penuh, maka model laporan hasil belajarnya (raport) menggunakan model raport reguler yang sedang berlaku.
- b. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi, model raport yang dipergunakan adalah raport reguler yang dilengkapi dengan deskripsi (narasi) yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya.
- c. Bagi siswa yang menggunakan kurikulum PPI, maka menggunakan model raport kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar anak.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro**

Faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro saat ini adalah: 1) sekolah masih berkomitmen untuk melaksanakan program inklusi karena program ini sangat membantu peserta didik dalam bersosialisasi dengan peserta didik lainnya dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka, 2) penyelenggaraan pendidikan inklusi juga tidak terlepas masih ada siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, 3) pemerintah masih mendukung terlaksananya program dengan memberikan dana operasional, 4) guru-guru masih konsisten melaksanakan program inklusi ini, 5) tersedia media pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses KBM, 6) adanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua.

Faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro saat ini adalah: 1) masih ada sebagian orang tua yang peduli terhadap program inklusi, 2) media pembelajaran yang masih kurang, 3) tidak ada Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah ini, 4) pengetahuan guru tentang cara mendidik anak berkebutuhan khusus masih kurang, 5) sebagian orang tua belum konsisten dalam mendukung program inklusi ini.

Harapan pihak sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi yang lebih baik adalah: 1) adanya pelatihan untuk guru mengenai cara menangani siswa inklusi, 2) Ada Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi, 3) Orang tua lebih aktif dalam mendukung anaknya agar program ini lebih efektif.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat

disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro untuk anak berkebutuhan khusus adalah kurikulum sekolah reguler karena siswa lamban belajar masih dapat mengikuti kurikulum reguler dengan diberikan pembelajaran tambahan untuk meningkatkan hasil belajarnya. Baik siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler lainnya menerima materi yang sama dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru kelas sebelum proses pembelajaran. Guru belum melibatkan pihak lain seperti orang tua atau kepala sekolah untuk merancang kurikulum karena kurikulum yang digunakan untuk siswa berkebutuhan khusus masih sama dengan siswa lainnya.

Pelaksanaan pendidikan yang berjalan saat ini masih menunjukkan program pembelajaran yang sama diberlakukan untuk semua peserta didik. Peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta didik lainnya dengan program yang telah dirancang oleh guru kelas. Guru menggunakan metode dan pendekatan yang sama kepada setiap peserta didik dan menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi. Program yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus setiap tahunnya diganti oleh kelas yang lainnya, jadi program yang diberikan tidak berkelanjutan. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memerlukan pelayanan khusus selama dia menempuh pendidikan di sekolah inklusi, jadi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti program inklusi sebaiknya diberikan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dan kenaikan kelas di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro mengacu pada standar kurikulum nasional. Siswa berkebutuhan khusus mengikuti proses penilaian yang sama dengan siswa reguler lainnya, sistem evaluasi antara lain ulangan harian, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Kenaikan

Kelas, dan Ujian Nasional. Anak berkebutuhan khusus mempunyai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sama dengan siswa lainnya. Perbedaannya hanya terdapat pada ulangan harian tambahan yang dilakukan peserta didik pada saat jam belajar tambahan pada siang hari. Adanya perbedaan tingkat kedalaman materi yang lebih rendah dibandingkan pada saat ulangan harian bersama peserta didik lainnya, memungkinkan nilai siswa menjadi lebih tinggi sehingga dapat mencapai KKM. Laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus menggunakan nilai angka atau kuantitatif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro memiliki faktor pendukung antara lain sekolah masih berkomitmen untuk melaksanakan program inklusi, masih ada siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah tersebut, dukungan pemerintah terhadap program ini dengan memberikan bantuan dana masih berjalan, guru-guru masih konsisten melaksanakan program inklusi ini, tersedia media pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses KBM.

Sedangkan yang masih menjadi faktor penghambat pelaksanaan program ini antara lain masih ada sebagian orang tua yang tidak peduli terhadap program inklusi, media pembelajaran yang masih kurang, kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah ini, pengetahuan guru tentang cara mendidik anak berkebutuhan khusus masih kurang, dan sebagian orang tua belum konsisten dalam mendukung program inklusi ini.

Manajemen pendidikan inklusi yang baik diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan pendidikan inklusi berjalan dengan optimal. Pendidikan inklusi merupakan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan kewenangan pelaksanaan ada pada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah agar satuan pendidikan sebagai pelaksana dapat memahami baik secara konsep maupun praktek agar peserta didik dapat ditangani dengan optimal di sekolah reguler.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat PSLB, 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Khusus: Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Dirjendikdasmen.
- Joyce B. dan Weil M. 2000. *Models of Teaching*. Amerika: A. Pearson Education Company.
- Heward. 1989. *Cara Memahami dan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Rusman. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV.Afabeta.